



PPID
Kementerian Pariwisata

Menyambut Tahun 2019, Kementerian Pariwisata Benahi Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID

23/10/2018 PPID Kemenkeu – Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah berlaku selama delapan tahun, maka pembenahan pengelolaan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) perlu segera dilakukan. Pembenahan sebaiknya diawali dengan membentuk struktur PPID yang lebih memudahkan dilakukannya koordinasi antar lima unit eselon I di lingkungan Kemenpar. Selanjutnya, pejabat yang ditugaskan sebagai PPID sebaiknya ditetapkan berdasarkan jabatan, sehingga mutasi pejabat di lingkungan Kemenpar tidak memengaruhi layanan PPID. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi (Kabag MPDLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku perwakilan PPID Kemenkeu dalam acara Standarisasi Informasi Kementerian Pariwisata yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Publik Kemenpar pada hari Selasa (23/08) di Ruang Jayakarta, Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut perwakilan PPID Kemenkeu menyatakan, pembentukan struktur PPID dan penunjukkan PPID di Kemenpar perlu diikuti dengan standar layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan komitmen yang sama di seluruh unit eselon I. Dengan demikian, pengelolaan layanan informasi publik melalui PPID pada Kemenpar bisa dimulai dengan budaya kerja yang baru di tahun 2019.

Kegiatan Standarisasi Informasi ini dihadiri oleh peserta yang merupakan perwakilan dari pejabat eselon IV Kemenpar dan dibuka oleh Bapak Guntur Sakti, Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Komblik menegaskan bahwa memasuki tahun 2019 tidak ada lagi tawar menawar bagi Kemenpar untuk melaksanakan perubahan layanan informasi publik melalui PPID, dengan harapan semakin banyak pihak yang terkoneksi dengan platform layanan informasi publik dimaksud. Selain perwakilan dari PPID Kemenkeu, hadir pula narasumber dari Konsultan Reformasi Birokrasi yang akan membantu Biro Komblik Kemenpar dalam membenahi layanan informasi publik PPID menjelang tahun 2019.(ts-em)